



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD ISTAN
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN
3. NHK : 876211

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.675.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 419 m2/198 m2 di KAB / KOTA CURUP, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah Seluas 9.985 m2 di KAB / KOTA CURUP, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 240 m2 di KAB / KOTA KEPAHANG, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA KOTA LUBUKLINGGAU , Rp. 750.000.000
5. Tanah Seluas 3.500 m2 di KAB / KOTA LAHAT, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
6. Tanah Seluas 15.000 m2 di KAB / KOTA LAHAT, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
7. Tanah Seluas 3.500 m2 di KAB / KOTA LAHAT, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **63.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO GT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOPPY Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.



23.000.000

4. MOBIL, SCOOPY MOTOR Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp.

26.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 612.050.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 932.308.426

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 66.300.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.348.658.426

III. HUTANG

Rp. 776.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.572.658.426

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.